GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN DESA EKS. TRANSMIGRASI DI KAWASAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA

Pembangunan Permukiman Transmigrasi dilaksanakan mulai tahun 1979 sampai dengan tahun 1982 pada Lokasi SKP. A yang sudah menjadi Kecamatan Bunguran Tengah terdiri dari 3 SP yaitu SP.1 (Desa Harapan Jaya), SP.2 (Desa Tapau) dan SP.3 (Desa Air Lengit) pemekaran dari Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2014 dengan penempatan transmigran awal mulai tahun 1981 sampai tahun 1983 sebanyak 950 KK. dan masa Pembinaannya berakhir kemudian diserahkan pada Pemerintah Daerah tahun 1989 dan menjadi desa definitif.

Pembangunan Permukiman Transmigrasi SKP.B Batubi dilaksanakan tahun 1992 sampai tahun 1994 terdiri 3 SP yaitu SP.1 (Desa Batubi Jaya), SP.2 (Desa Gunung Putri) dan SP.3 (Desa Sedarat Baru) dengan jumlah transmigran sebanyak 1.060 KK. berasal dari asal dan pendamping dari daerah setempat. Pembinaan transmigran sampai tahun 1999 mulai dari penempatan kemudian dilakukan serah terima pembinaannya pada Pemerintah daerah tahun 1999 menjadi desa Definitif sesuai Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi sedangkan Penyerahan Pembinaan Permukiman Transmigrasi kepada Pemerintah Daerah Tahun 2009, sesuai Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.275/MEN/IX/2009 sebanyak 156 UPT (Unit Permukiman Transmigrasi) seluruh Indonesia termasuk Trans Batubi.

Seiring perkembangan Kabupaten Natuna, dengan melihat kondisi daerah kepulauan maka pada tahun 2006 – 2007 Kabupaten Natuna telah memiliki 16 Kecamatan. 6 Kecamatan pemekaran baru itu diantaranya adalah Kecamatan Pulau Tiga, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Siantan Selatan, Siantan Timur dan Jemaja Timur dengan total jumlah kelurahan/desa sebanyak 75. Pada Tahun 2008 Kabupaten Natuna melakukan pemekaran dengan dibentuk Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga kecamatan menjadi 12 Kecamatan. Namun demikian, pada tahun 2015 dilakukan pemekaran desa dan kecamatan, sehingga Kabupaten Natuna terdiri dari 15 kecamatan, 70 Desa dan 6 Kelurahan. Dengan mengingat kondisi dan rentang kendali yang selama ini juga terjadi di wilayah kepulauan kecil maka pada Tahun 2022 mengalami pemekaran lagi di wilayah Kecamatan Bunguran Utara yang sebelumnya merupakan Desa Seluan dimekarkan menjadi kecamatan Seluan dan terdiri 3 Desa serta Kecamatan Serasan yang didalamnya terdapat Desa Pulau Panjang dan Desa Kerdau yang letaknya juga jauh dari Kepulauan Serasan dimekarkan menjadi Kecamatan Pulau Panjang dengan didalamnya membawahi 3 (tiga) desa lama dan 1 Desa Pemekaran, Jadi sampai saat ini di Kabupaten Natuna terdapat 17 Kecamatan, 70 Desa dan 6 Kelurahan di tahun 2024.

Kecamatan Bunguran Tengah yang merupakan SKP Eks. Transmigrasi SKP A terdiri dari 3 Desa Eks.Transmigrasi dimekarkan pada tahun 2006 sesuai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bunguran Tengah dan merupakan pemekaran Kecamatan dari Kecamatan Bunguran Timur. Sedangkan Kecamatan Bunguran Batubi yang dimekarkan tahun 2014 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2014, sebelumnya 5 Desa yang berada di Kecamatan Bunguran Batubi termasuk 3 (tiga) desa) didalamnya adalah desa definitive Eks. Transmigrasi yaitu SP.1 Desa Batubi Jaya, SP.2 Desa Gunung Putri dan SP.3 Desa Sedarat Baru masuk dalam wilayah Kecamatan Bunguran Barat.

Sehubungan dengan adanya Pemekaran Desa dan Kecamatan, maka perubahan batas desa, batas kecamatan sangat berpengaruh sekali pada pengembangan wilayah desa dan kecamatan masing – masing. Hal yang menjadi bahan pembicaraan di setiap desa Eks. Transmigrasi dan sekitarnya adalah batas wilayah desa dengan batas Satuan Permukiman Transmigrasi yang dianggap tidak sama. Disini nampak sekali memang perbedaan diantaranya :

1. Batas SP (Satuan Permukiman Transmigrasi) sangat berbeda dengan Batas Desa karena Batas desa dapat berubah kapanpun dengan melalui pembahasan, rapat koordinasi dan kesepakatan di Daerah, sedangkan Batas Satuan permukiman sampai kapanpun tetap sama tidak berubah. Batas Satuan Permukiman Transmigrasi bisa berada di dalam batas Desa dan bahkan antar desa karena Transmigrasi dibentuk dari HPL Transmigrasi yang sudah lama sesuai perencanaan, pembangunan transmigrasi tahun sebelum transmigrasi ada, sedangkan batas desa baru dibentuk. Sejarah adanya transmigrasi karena adanya HPL Transmigrasi yang didalamnya terdapat Satuan Kawasan Pengembangan Transmigrasu, Unit Permukiman Transmigrasi dan Satuan Permukiman Transmigrasi.
2. Batas Satuan Kawasan Pengembangan Transmigrasi dengan batas Kecamatan juga pasti berbeda karena Batas Kecamatan juga dapat berubah kapanpun dengan melalui pembahasan, rapat koordinasi dan kesepakatan di Daerah, sedangkan Batas Satuan Kawasan Pengembangan Transmigrasi sampai kapanpun tetap sama tidak berubah. Batas Satuan Kawasan Pengembangan Transmigrasi bisa berada di satu Kecamatan dan bahkan antar Kecamatan karena Transmigrasi dibentuk dari HPL Transmigrasi yang sudah lama sesuai perencanaan, pembangunan transmigrasi tahun sebelum transmigrasi ada, sedangkan batas Kecamatan baru dibentuk sesuai pemekarannya dan perubahannya. Sejarah adanya transmigrasi karena adanya HPL Transmigrasi

yang didalamnya terdapat Satuan Kawasan Pengembangan Transmigrasi, Unit Permukiman Transmigrasi dan Satuan Permukiman Transmigrasi.

A. Kondisi Eks. Permukiman Transmigrasi SKP. A Kecamatan Bunguran Tengah

SKP.A Bunguran Tengah memiliki luas ± 5.260 Ha Berada dalam HPL Transmigrasi. Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Unit Permukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi secara Nasional dari Menteri Transmigrasi dan permukiman Perambah Hutan Kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta Tahun 1994. Pengesahan Desa-Desa Persiapan Ex Unit Permukiman Transmigrasi dalam Propinsi Daerah Tingkat I Riau Tanggal 19 Oktober 1994, bahwa di Kabupaten Kepulauan Riau terdapat 2 UPT yaitu UPT.I , SP.1 Desa Harapan Jaya seluas 1.760 Ha dan UPT.II yang terdiri dari SP.2 Desa Tapau dan SP.3 Desa Air Lengit seluas 3.500 Ha.

SKP.A Kecamatan Bunguran Tengah sampai saat ini sudah berumur 40 Tahun, Pola Transmigransi adalah TPLK (Tanaman Pangan lahan Kering, seiring berjalannya waktu program tersebut dianggap tidak berhasil karena pasar sehingga pola warga transmigrasi berubah menjadi pola campuran yaitu sebagian lahan diperuntukkan Tanaman Pangan Lahan kering dan sebagian lahan usaha diperuntukkan tanaman karet dan pada tahun 2001 Pemerintah Pusat membangun Bendungan Tapau dan saluran Irigasi primer sepanjang 12 Km dengan maksud agar lahan usaha masyarakat transmigrasi dapat dijadikan persawahan yang hasilnya dapat membantu kebutuhan pangan di Kabupaten Natuna, namun sampai saat ini juga belum bisa diandalkan.

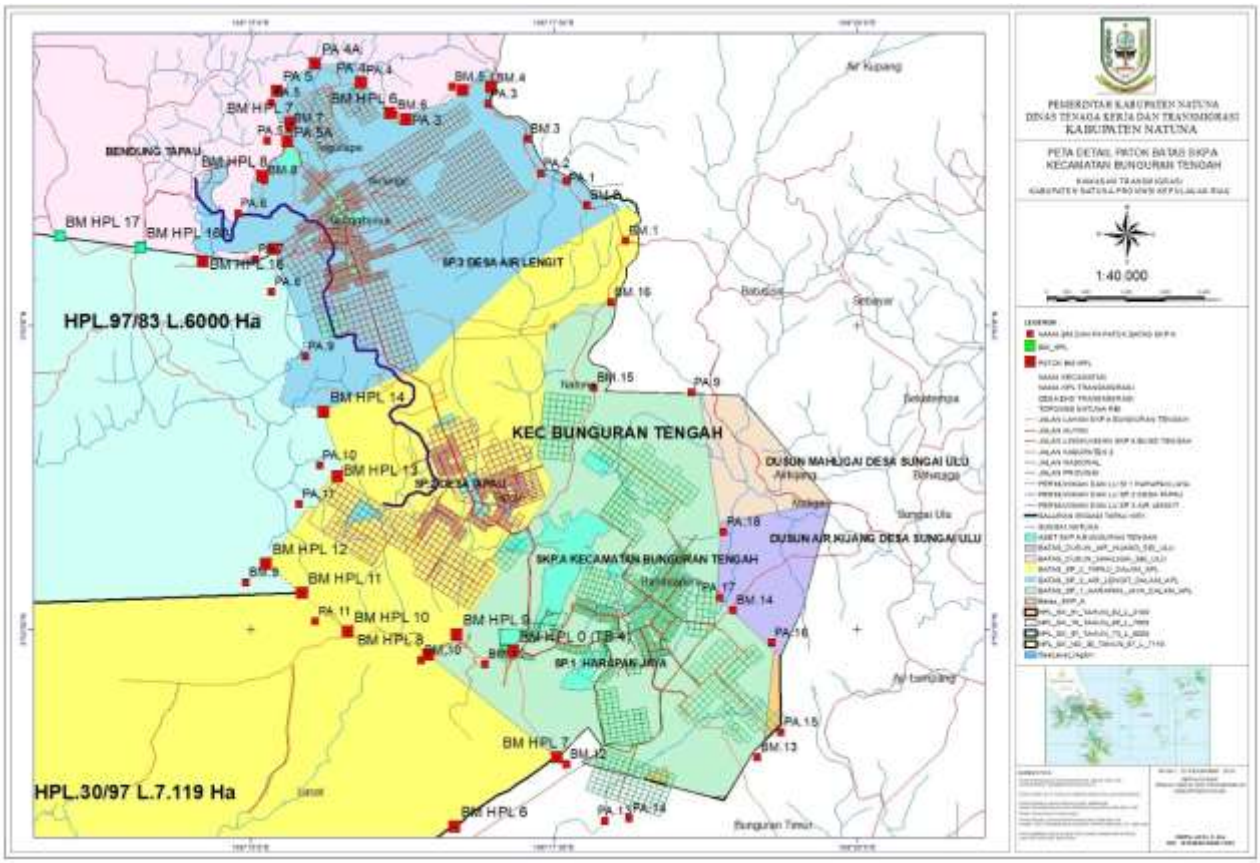
Bila dilihat dari perkembangan penduduk saat ini yang semakin pesat terutama pertambahan penduduk di wilayah kecamatan Bunguran Tengah, bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk baik dari dalam wilayah tersebut maupun pertambahan penduduk dari luar wilayah Kecamatan Bunguran Tengah, kerena wilayah Kecamatan Bunguran Tengah selain letaknya yang strategis beradfa di tengah Pulau Bunguran Besar juga masuk dalam kategori wilayah kota yang jaraknya dari Kantor Bupati Natuna hanya 7 Km selalu mendapatkan perhatian khusus untuk pengembangan kota, pengembangan ekonomi, budaya dan karena merupakan basis pertanian dengan kondisi geografis dan penduduknya memiliki potensi untuk pengembangan pangan, selain itu wilayah Kecamatan Bunguran Tengah juga terdapat bangunan Irigasi dan Bendung Tapau yang dapat dijadikan sebagai penyangga pengembangan tanaman pangan, maka wilayah tersebut banyak perhatian khusus dari masyarakat luar wilayah Kecamatan

Bunguran Tengah, perhatian oleh Investor dan pengusaha. Kondisi Pertambahan Penduduk mulai dari Penempatan sampai saat ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk di Kecamatan Bunguran Tengah SKP.A, SP.1, Sp.2 dan SP.3 sampai dengan Januari 2025

No.	SP/Desa Eks. Transmigrasi	Tahun Penempatan	Juml. KK	JUMLAH KK SAAT PENYERAHAN TH.1994	JML. PENDUDUK SAAT PENYERAHAN 1994	Jumlah KK Saat ini	Juml. Penduduk Saat ini (Jiwa)
1.	SP.1 Ds.Harapan Jaya	1981/1982	350	213	1.084	528	1.658
2.	SP.2 Desa Tapau	1982/1983	275	182	715	332	1.053
3.	SP.3 Desa Air Lengit	1982/1983	325	183	718	343	1.107
Jumlah			950	578	2.517	1.203	3.818

Gambar 2.1
Lokasi Eks. Transmigrasi SKP.A Bunguran Tengah SP.1, SP.2 dan SP.3



B. Kondisi Eks. Permukiman Transmigrasi SKP. B Kecamatan Bunguran Batubi

Program Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Natuna dilanjutkan kembali Pada tahun 1990 diawali dengan melakukan survey RTSP pada Rencana Satuan Kawasan Pengembangan SKP.B Batubi dan sekarang menjadi Kecamatan Bunguran Batubi. Tahapan survey Rencana Sarana dan Prasarana (Sarpras) dilaksanakan pada tahun 1991 yang kemudian dilanjutkan untuk pembangunan Sarana dan Prasarana SKP. B Batubi dengan jumlah 3 SP dilaksanakan selama 3 Tahun secara bertahap mulai tahun 1992 sampai dengan tahun 1994, kemudian penempatan Transmigran berasal dari Daerah lain dan pendamping dari daerah asal sebanyak 1.060 KK dilaksanakan di 3 SP secara bertahap mulai tahun 1992 sampai dengan tahun 1994 dengan jumlah transmigran yang ditempatkan sebagai berikut :

1. SP.1 (Desa Batubi Jaya) 465 KK, Penempatan tahun 1995-1996
2. SP.2 (Desa Gunung Putri) 345 KK Penempatan tahun 1996-1997
3. SP.3 (Desa Sedarat Baru) 250 KK. Penempatan tahun 1996-1997

Setelah pembinaannya selama 5 tahun sampai tahun 1999 dengan pola Trans-Bun (Tansmigrasi Perkebunan) maka serah terima pembinaan dilaksanakan pada tahun 1999 menjadi desa Definitif sesuai Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi sedangkan Penyerahan Pembinaan Permukiman Transmigrasi kepada Pemerintah Daerah Tahun 2009, sesuai Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.275/MEN/IX/2009 sebanyak 156 UPT (Unit Permukiman Transmigrasi) seluruh Indonesia termasuk Trans Batubi.

SKP.B kecamatan Bunguran Batubi SP.1 Desa Batubi Jaya, SP.2 Desa Gunung Putri dan SP.3 Desa Sedarat Baru menjadi Kecamatan Bunguran Batubi atas Pemekaran dari Kecamatan Bunguran Barat Tahun 2014 Berdasarkan **Perda Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2014** terdiri dari 3 Desa Eks Transmigrasi, 1 Desa induk dan 1 Desa Pemekaran dari Desa Induk Sedana Timur.

Pemanfaatan Lahan sesuai dengan Program Transmigrasi bahwa masing – masing KK mendapatkan 3 Jenis lahan dan 3 jenis sertifikat Hak milik yaitu Lahan Pekarangan seluas 0,5 Hektar / KK, Lahan Usaha I seluas 1 Hektar / KK dan Lahan Usaha II seluas 2 Hektar / KK sesuai dengan tabel di bawah :

Tabel 2.2.
Rekap Peruntukan Lahan Transmigran Skp.B Batubi Sp.1, Sp.2 Dan Sp.3

No.	Desa	No. SP	Tahun Penempatan	Penempatan Awal (KK)	Jmlh Penduduk Saat Ini (KK)	Sertipikat Sudah Terbit			Sertipikat Belum Terbit		
						LP	LU 1	LU 2	LP	LU 1	LU 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Batubi Jaya	SP. 1	1995/1996	465	423	465	465	178	-	-	287
2	Gunung Putri	SP. 2	1995/1996	345	360	345	345	87	-	-	258
3	Sedarat Baru	SP. 3	1996/1997	250	143	250	250	142	-	-	108
Jumlah				1,060	926	1,060	1,060	407	-	-	653

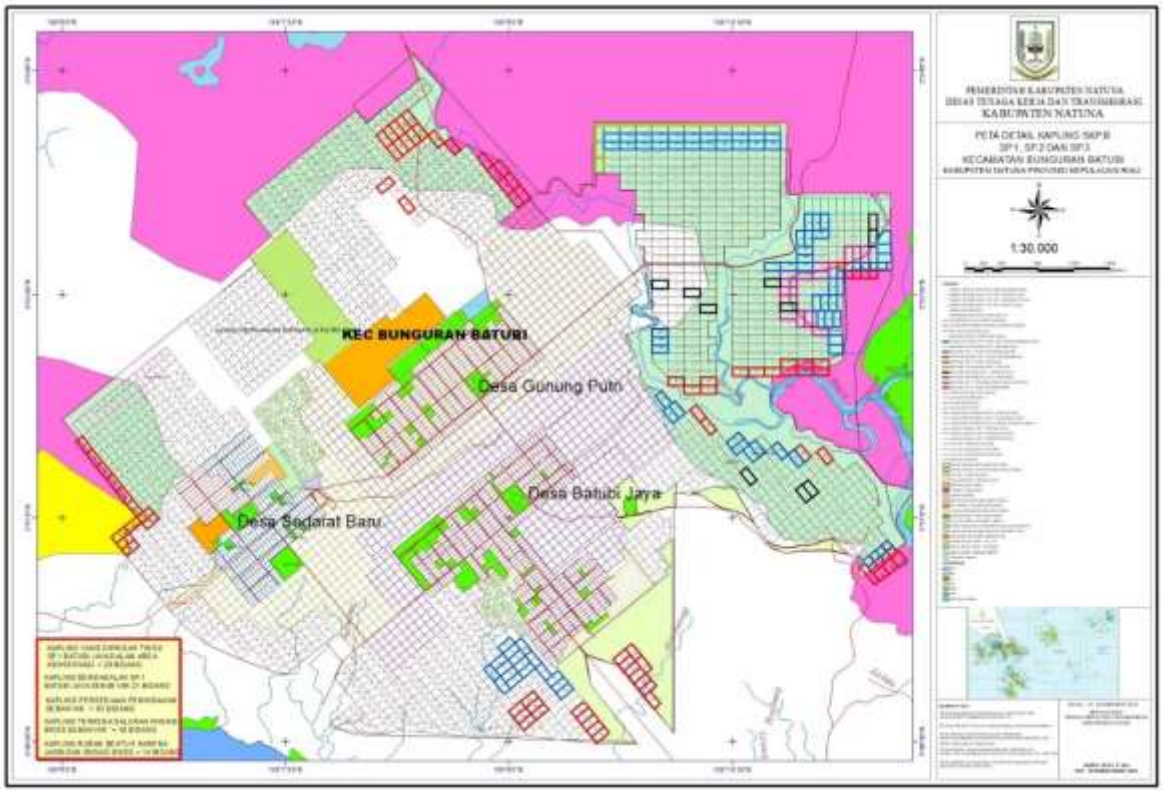
Luasan SKP.B Kecamatan Bunguran Batubi SP.1 Desa Batubi Jaya, SP.2 Desa Tapau dan SP.3 Desa Sedarat Baru total seluas 5.640,12 Hektar berada dalam HPL Transmigrasi. Secara fisik dilapangan bahwa lahan yang jelas peruntukannya yaitu untuk Lahan Aset, Lahan untuk Transmigran sebanyak 1.060 KK berupa Lahan Pekarangan masing masing KK 0,5 Ha, Lahan Usaha I masing – masing KK seluas 1 Hektar dan Lahan Usaha I masing – masing KK seluas 2 Ha dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.6
Rekap Kepemilikan Lahan oleh Transmigran SKP.B Kecamatan Bunguran Batubi

No.	Uraian	Jumlah KK	LP (Ha)	LU I (Ha)	LU II (Ha)	Lahan Aset	Luas Lahan
1.	SP.1 Batubi Jaya	465	0,5	1	2	73	1.700,05
2.	SP.2 Desa G. Putri	345	0,5	1	2	68	1.275,50
3.	SP.3 Desa SEdarat Baru	250	0,5	1	2	56	931,00
Jumlah		1.060	530	1.060	2.120	197	3.906,55

Dari rekap tersebut bila dibandingkan dengan jumlah luasan keseluruhan masih ada lahan tersisa seluas 1.733,57 Hektar yang didalamnya termasuk Sungai, Jalan, Lahan Konservasi dan Ruang terbuka Hijau. Yang masuk dalam Kawasan Hutan HPK (Hutan Produksi yang dapat di konversi) yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian pelepasan Kawasan Hutan.

Gambar 2.2. Peta Wilayah SKP.B Batubi SP.1, SP.2 dan SP.3



Kondisi Eksisting SKP.B Batubi SP.1, SP.2 dan SP.3

Program Transmigrasi di Kabupaten Natuna di mualai sejak tahun 1979, oleh Departemen Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan. Pembangunan Permukiman Transmigrasi dilaksanakan mulai tahun 1979 sampai dengan tahun 1982 pada lokasi SKP. A terdiri dari 3 SP (Satuan Permukiman) yaitu SP.1, SP.2 dan SP.3 yang sekarang menjadi Desa Harapan Jaya (SP.1), Desa Tapau (SP.2 dan Desa Air Lengit (SP.3) dengan pola transmigrasi pola Transmigrasi Umum TPLK (Tanaman Pangan Lahan Kering) dan penempatan transmigran mulai tahun 1981 sampai tahun 1983 yaitu :

1. SP.1 (Desa Harapan Jaya) 350 KK Penempatan tahun 1983-1984
2. SP.2 (desa Tapau) 275 KK Penempatan tahun 1984-1985
3. SP.3 (Desa Air Lengit) 325 KK. Penempatan tahun 1984-1985

pembinaan transmigran selama 5 tahun dan berakhir masa pembinaan tahun 1989, kemudian serahterima pembinaan transmigran kepada Pemerintah Daerah dan Serah Terima Unit Permukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi secara Nasional dari Menteri Transmigrasi dan permukiman Perambah Hutan Kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta Tahun 1994

Kondisi Lahan Usaha I yang sudah digarap untuk pengembangan Tanaman Pangan










Kondisi Lahan Usaha II masih belum digarap